

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI I DPR RI  
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI,  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL  
INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
LEMBAGA SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI,  
LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT)**

---

Tahun Sidang	: 2010-2011
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: RDP Komisi I DPR RI dengan Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi beserta Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 23 Juni 2011
Pukul	: 13.30 WIB
Pimpinan Rapat	: Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita
Sekretaris Rapat	: Suprihartini, S.IP.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	: 1. Penjelasan Dubes LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi 2. Penjelasan Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI
Hadir Anggota	: ... orang dari 50 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah	: Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi beserta Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Arab Saudi beserta Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**

1. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa pelaksanaan tugas perlindungan terhadap TKI di negara Arab Saudi yang dilaksanakan oleh jajaran Kedutaan Besar RI di Arab Saudi masih dirasakan belum optimal.
2. Khusus terkait dengan kasus Ruyati binti Satubin, Komisi I DPR RI minta kepada Kedutaan Besar RI di Arab Saudi agar memfasilitasi keluarga Alm.Ruyati binti Satubin untuk dapat berziarah ke makam Almarhumah, serta melakukan upaya optimal untuk memastikan agar hak-hak Alm.Ruyati binti Satubin selama bekerja dapat diberikan.
3. Dalam rangka upaya perlindungan terhadap para TKI yang sedang terancam hukuman mati dan terancam berbagai tindakan yang menyalahi prosedur hukum yang berlaku di negara Arab Saudi, Komisi I DPR RI minta kepada jajaran Kemlu, khususnya jajaran Kedutaan Besar RI di Arab Saudi, agar melakukan berbagai langkah yang bersifat pro-aktif dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap para TKI tersebut.
4. Komisi I DPR RI minta kepada Pemerintah melalui jajaran Kemlu dan Perwakilan-Perwakilan RI agar segera melakukan *asesment* secara menyeluruh dan mendalam tentang berbagai kondisi dan situasi yang ada di negara akreditasi, diantaranya meliputi; peraturan hukum yang berlaku, adat-budaya dan kebiasaan setempat, serta kondisi dan sistem politik yang ada. Berdasarkan hasil *asesment* tersebut, Kemlu agar menjadi penentu akhir sehubungan dengan keputusan kelayakan keberangkatan dan penempatan TKI ke suatu negara.
5. Komisi I DPR RI minta kepada Pemerintah untuk melakukan pendekatan secara multilateral sehingga Arab Saudi mau menandatangani konvensi tentang *migrant worker*.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 18.45 WIB

Jakarta, 23 Juni 2011

**KETUA RAPAT,**

**DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA**  
**A-207**